

SIM KOMUNITAS

Program Pangkas Waktu

Program mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara kelompok atau disebut SIM Komunitas, yang digelar jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya mendapat respon positif dari berbagai kalangan.

SEJAUH program tersebut digulirkan bulan lalu, pihak yang merespon positif antara lain, kelompok artis ibu kota dan pebisnis yang berdomisili di Arta

Gading Mal, Jakarta Utara.

Pelaksanaan SIM Komunitas di Arta Gading, pertengahan bulan lalu, bahkan disaksikan langsung sejumlah pejabat dari Kementerian Aparatur Negara dan dipandu langsung oleh Dir Lantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Drs Djoko Susilo, Msi.

Seperti diungkapkan Kombes Drs Djoko Susilo, Msi bahwa program ini diluncurkan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh SIM, terutama bagi komunitas

yang sibuk. "Persyaratannya sama dengan ketika seseorang akan membuat SIM di Satpas SIM Daan Mogot. Bedanya, mereka harus mengajukan permohonan perkelompok paling sedikit 30 orang dan menyiapkan lapangan yang cukup untuk uji teori dan praktik," kata Djoko Susilo.

Sementara, pelaksanaan di Arta Gading, atas permintaan pengelola kompleks bisnis tersebut kepada Unit pelayanan SIM Polda Metro Jaya. "Syarat yang mereka ajukan





cukup sehingga SIM Komunitas bisa digelar di kawasan bisnis di sini," kata Iptu Subianto.

Nila, karyawan salah satu perusahaan di Arta Gading mengakui sangat terbantu dengan program tersebut karena tidak perlu datang jauh-kauh ke Satpam SIM di Daan Mogot. "Kami tak perlu meninggalkan pekerjaan untuk mendapatkan SIM," kata Nila, yang membuat SIM A.

KOMUNITAS ARTIS

Sementara, akhir bulan lalu, suasana lain juga terjadi areal parkir timur, Senayan, Jakarta Pusat. Lebih dari lima puluh artis ibu kota, dengan suasana riang gembira mengikuti proses pendaftaran, uji teori dan praktik maupun foto diri saat membuat SIM Komunitas di tempat tersebut.

Salah satu peserta, penyanyi

dangdut ternama, Iis Dahlia tak mengira jika membuat SIM A semudah ini. "Ternyata sangat mudah mendapatkan SIM," katanya. "Tidak seperti selama ini digambarkan orang bahwa memperoleh SIM harus melalui cara-cara tertentu agar lulus. Saya tidak. Ikut proses dan lulus," katanya sambil memperlihatkan SIM A, yang baru diperolehnya.

Sama seperti Iis, aktor dan bintang iklan Nicky Baskoro malahan tertawa-tawa kegirangan ketika SIM A-nya diberikan oleh petugas. "Aha! Akhirnya gue punya SIM juga," katanya.

Dia mengakui selama ini tidak pernah memiliki SIM kendati nyetir mobil sendiri. "Pernah sih salah jalan terus ditangkap polisi," katanya. "Sekarang gue punya SIM dan gak ragu lagi bawa kendaraan," tuturnya.

Baik Iis maupun Nicky mengaku diundang teman-temannya untuk bikin SIM. "Tadinya aku malas karena harus ke Daan Mogot. Tapi temanku bilang, ini beda. Kita kumpul di Senayan. Ternyata benar," katanya.

SYARAT

Benar apa yang dikatakan sederet artis dan pemohon SIM komunitas lainnya, bahwa mendapat SIM Komunitas itu gampang. Ajukan surat permohonan SIM Komunitas ke Ditlantas Polda Metro Jaya atau unit pelayanan SIM. Peserta paling sedikit 30 orang dan paling banyak 150 orang, serta paling sedikit 30 orang dan menyediakan tempat yang cukup memadai untuk uji teori dan praktik. Pemohon SIM C usia minimal 16 tahun dan pemohon SIM A minimal berusia 17 tahun. [jt 02]

MENSINERGIKAN SIM DAN KESELAMATAN LALU LINTAS

PROGRAM SIM Komunitas yang baru diluncurkan jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya merupakan inovasi baru yang tujuannya selain mempermudah komunitas tertentu dalam memperoleh legalitas mengemudi, juga sebagai sarana untuk menguatkan komitmen masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas.

LAHIRNYA inovasi tersebut, seperti diakui Kabag Regiden Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Giri, berangkat dari masalah karena ada dua komponen kepolisian, kemitraan dan problem solving. Lalu lintas sudah punya data kecelakaan dan pelanggaran dan dapat dianalisa kira-kira komunitas masyarakat yang jadi dominan, lalu komunitas tersebut menjadi sasaran kampanye masalah lalu lintas.

"Kecelakaan menjadi masalah dengan bobot paling tinggi. Perbulan bisa mencapai 400-500 kejadian, menyebabkan 80-an orang meninggal dunia. Tingginya angka kecelakaan tersebut menyimpulkan bahwa masyarakat belum mempunyai komitmen terhadap keselamatan lalu lintas. Padahal, keselamatan harus dimulai sejak dini mulai dari hal terkecil," kata Giri Purwanto.

Karena itu, kata Giri Purwanto, jajaran Ditlantas Polda Metro Jaya membuat sinergi kampanye keselamatan lalu lintas. "Memang, Mengumpulkan orang tidak gampang. Karena itu, strategi yang sedang dikembangkan Polri dalam konsep kepolisian, tidak didatangi masyarakat tapi mendatangi. Kita mengadopsi sistem aplikasi SIM keliling," tambah Giri Purwanto.

Mal-mal menjadi salah satu tempat untuk menyelesaikan masalah. Misalnya di Pusat Grosir Cililitan, Taman Palem. "Kita mau mau nanti yang meresmikan langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Intinya, kita mensinergikan SIM dan keselamatan lalu lintas.

Supaya masyarakat mudah dikumpulkan kita pilih secara kolektif," tegas Giri Purwanto.

MEKANISME

Agar program tersebut bisa berjalan lancar, Ditlantas menerapkan dua mekanisme pelayanan. Pertama, polisi sendiri yang berinisiatif. Polisi mendatangi komunitas mana yang berminat. "Atau kita memilih komunitas yang mampu membantu masalah lalu lintas. Lalu kita mendatangkan *public figure* untuk minat," katanya.

Mekanisme kedua, masyarakat yang berinisiatif. "Mekanisme ini, kita tetap melayani masyarakat yang berinisiatif mengajukan SIM Komunitas, tapi tetap kita pilih berdasarkan survey dan penilaian kita seberapa jauh kesiapan mereka. Yang kita cermati surat dari masyarakat pemohon yang didalamnya menyampaikan kira-kira alasan yang bisa menguatkan bagi komunitas pelayanan SIM. Tidak semua orang mau ke kantor polisi. Tapi kita *nggak* mungkin bisa layani sekaligus semua karena unit hanya satu dan petugas terbatas. Kita lihat juga apakah yang mereka ajukan di

tempat itu kesadarannya masih kurang hingga perlu kampanye penyadaran. Mereka dapat sebagai mitra, seperti pengelola Mal Arta Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara," urai Giri Purwanto.

Sementara ini, untuk melayani permintaan SIM baru, Ditlantas menyediakan satu unit mobil untuk produksi. "Jika SIM Keliling dilakukan seminggu sekali, maka SIM tidak terhingga tergantung komunitasnya," katanya. Untuk SIM A biayanya Rp 75 ribu, proses kesehatan dan asuransi. Sedangkan SIM C biayanya Rp 60 ribu.

[jt 02]





**UNIT II DIT IV/NARKOBA DAN OC BARESKRIM POLRI
BESERTA SELURUH JAJARAN DAN BHAYANGKARI**

MENGUCAPKAN

Selamat & Sukses

DIES NATALIS PTIK KE-62

WISUDA SARJANA ILMU KEPOLISIAN ANGKATAN 48 & 49 TA. 2008

17 JUNI 2008

BHAKTI - DHARMA - WASPADA



**KANIT II DIT IV/NARKOBA DAN OC BARESKRIM POLRI
KOMBES POL Drs SISWANDI**

PROPAM POLDA JATIM MELURUSKAN POLISI 'NAKAL'

BIDANG Propam Polda Jawa Timur (Jatim) sangat merespon setiap laporan yang disampaikan masyarakat terkait perbuatan anggota polisi yang tidak benar. Respon positif tersebut ditandai dengan rencana bidang profesi dan pengamanan membuat standar pelayanan bagi masyarakat yang melapor.

Hal ini diungkap Kombes Pol Drs Wanto Sumardi, Kabid Propam Polda Jawa Timur dalam perbincangan dengan Jagratara, baru-baru ini.

Menurut Wanto Sumardi, rencana tersebut terkait kebijakan Kapolda Jatim, yang fokusnya adalah pelayanan terhadap publik dan mengawal maklumat-maklumat penting Kapolda.

"Intinya, masyarakat yang datang mengadu ke sini kita terima dengan baik dan kita tindaklanjuti dengan cepat," katanya.

Kemudian, katanya, kalau perlu memberikan semacam terobosan seperti pelayanan yang dibuat di lalu lintas, yang sisi pelayanan publiknya berkembang sangat maju.

"Saya mempunyai pemikiran bagaimana jika Propam bergabung di situ, walaupun tidak setiap hari, mungkin bisa dilakukan satu minggu dua kali atau tiga kali ada petugas dari Propam, mungkin akan ada keluhan-keluhan terhadap kinerja polisi. Misalnya melalui kotak saran maupun yang disampaikan langsung," ucap Wanto Sumardi.

Tapi, katanya, untuk melakukan pelayanan seperti rencana itu, Propam menghadapi

kesulitan sumber daya manusia, karena jumlah anggota dari Propam sangat sedikit.

Propam Polda Jatim sendiri dibantu oleh tiga subbid. Subbid profesi yang menangani sidang komisi kode etik, kemudian ada subbid Paminal (Pengamanan internal). Kemudian subbid Provos yang menangani penegakkan disiplin.

Subbid-subbid dibantu oleh seksi-seksi. Di antaranya Seksi Yanduan, yaitu pelayanan pengaduan masyarakat, yang menampung keluhan masyarakat. Kemudian ada seksi rehabilitasi. Seksi ini untuk memulihkan nama baik anggota yang dilaporkan berbuat salah, tapi tidak terbukti. "Kita punya kewenangan untuk itu," tegas Wanto.

DILEMATIS

Tugas anggota Propam disadari tak mudah. Dalam melakukan tugas ada semacam dilematis. Di satu sisi, mengetahui bahwa kesejahteraan anggota tidak mencukupi. Di sisi lain, hukum harus ditegakkan.

"Sisi dilematis itu sangat sulit. Tugas propam ini kan sebenarnya mengamankan kebijakan-kebijakan yang ada di organisasi, selain itu kita juga menyeimbangkan dengan komplain-komplain yang terjadi di masyarakat. Karena itu, jika kita ada komplain dari masyarakat, kita tidak serta menyatakan anggota yang dilaporkan bersalah. Ada proses. Kita mengedepankan dulu dari fungsi Paminal. Ada penyelidikan internal untuk mengetahui bersalah atau benar," urai Wanto Sumardi menjelaskan.

Seperti dicontohkan, surat kaleng komplain tentang Kapolwiltabes. Propam tidak boleh langsung menuduh bahwa Kapolwiltabes itu bersalah. "Yang kita lakukan adalah mencari kebenaran dengan menurunkan anggota Paminal, mencari tahu apakah komplain itu benar, apa dibuat-buat, atau sedang diuji," katanya. "Kalau itu benar ditindaklanjuti. Kita juga memberikan umpan balik untuk yang sudah melaporkan atau memberikan informasi. Jika Informasi yang diberikan benar adanya kami mengucapkan terimakasih, informasi sudah kami tindaklanjuti," tambahnya.

Menjawab pertanyaan, jumlah angka

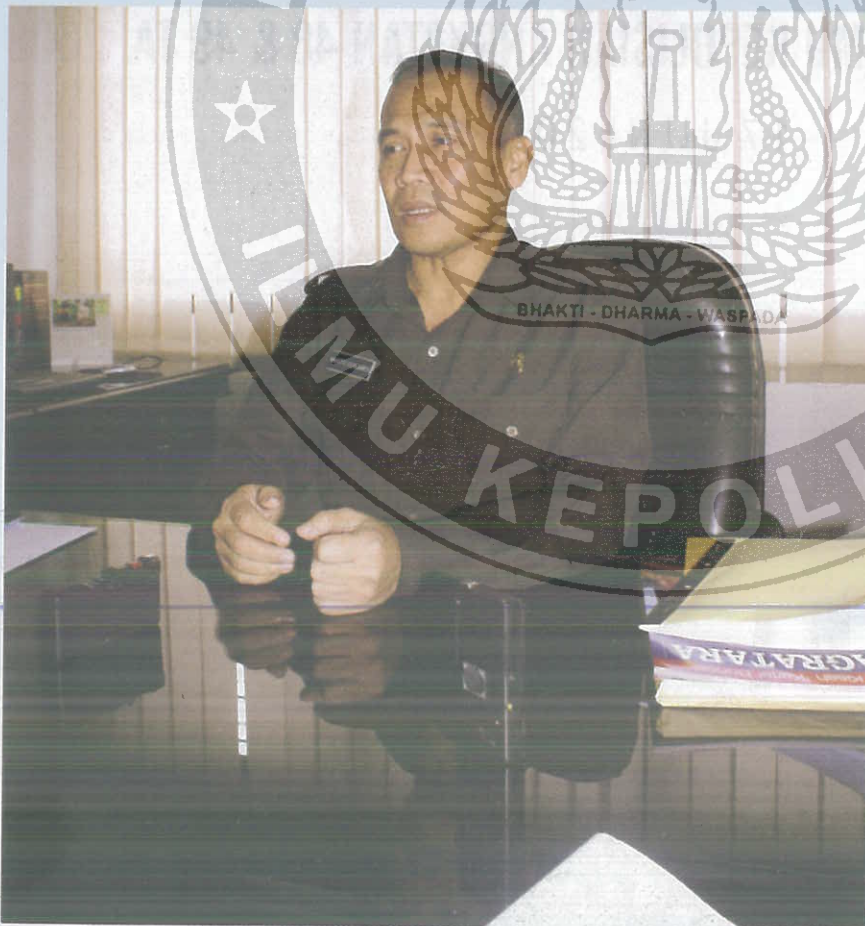


FOTO: EVA HARTINI

indisipliner yang dilakukan oleh anggota? Kabid Propam mengatakan bahwa semakin banyak melakukan operasi terhadap pelanggaran disiplin, temuannya juga akan sangat banyak. Hanya frekuensi yang sampai ke sidang disiplin bisa menurun.

Disiplin itu, terbagi atas ada pelanggaran disiplin, ada tindakan disiplin dan ada juga hukuman disiplin, tindakan disiplin sifatnya yang fisik, misalnya tidak memenuhi aturan, seperti gondrong, tidak menggunakan perlengkapan sesuai dengan ketentuan, sifatnya teguran secara lisan.

Sementara, menyangkut dengan kepentingan masyarakat yang tidak bisa tereliminir dengan baik, diungkapkan, yang biasanya di komplain oleh masyarakat adalah penyalahgunaan wewenang, tidak menggunakan prosedur yang benar, arogan. "Itulah yang muncul,".

Biasanya, ini berhubungan dengan tugas yang melekat pada anggota. Misalnya penyidik biasanya di komplain suka mencari-cari kesalahan. Contohnya pemeriksaan narkoba, ter-sangka tidak menggunakan tapi mengaku seperti diciptakan. "Biasanya begitu," katanya.

Kasus terbaru, anggota Polres Surabaya

Utara menciptakan situasi demikian, penyidik merekayasa seolah-olah seseorang pengguna, pemakai atau bahkan bandar. Lalu rumahnya digeledah, kemudian tidak ditemukan sesuatu, hanya ditemukan semacam kantung plastik. Kantung plastik itu digunakan sebagai barang bukti. "Ujung-ujungnya transaksi puluhan juta rupiah. Akhirnya orang tersebut komplain ke sini. Lalu kita pancing anggota tersebut untuk datang ke sesuatu tempat, diselidiki oleh Paminal dan Povost. Paswaktu transaksi kita tangkap. Sekarang sedang di proses," jelas Sumardi.

BUTUH KEBERANIAN

Agar fungsi Propam berjalan optimal, dibutuhkan keberanian dari masyarakat untuk melapor. Masyarakat terkadang takut melapor karena sudah diancam terlebih dahulu.

"Tapi, seperti ini untuk saat ini Propam sudah mulai diakui oleh masyarakat. Karena sekarang ini terkadang justru yang tidak ada kaitannya dengan anggota malah dilaporkan juga ke sini. Seolah-olah Propam bisa menyelesaikan semua masalah itu, padahal bukan bidangnya. Propam hanya bisa meluruskan prosedur yang ada. Melihat prosedur yang

ada benar atau tidak, saat menangani kasus, SPDP-nya sudah di buat atau belum, kemudian cara mengirimkan panggilan itu bagaimana, kemudian cara penangkapannya melibatkan penggeledahan atau tidak, LP dibuat atau tidak? Kalau tidak, itukan berarti prosedurnya tidak betul," urainya. "Ibu-ibu juga sering datang ke saya dan menyampaikan ke-luhannya. Misalnya dalam penggeledahan, anggota langsung lompat pagar dan sebagainya," cerita Wanto. "Tugas saya adalah menjalankan kebijakan-kebijakan pimpinan Polri, dalam hal ini tanggung jawabnya kepada Kapolda, sehingga kebijakan-kebijakan Pak Kapolda, harus saya ikuti terus," katanya.

Misalnya, katanya, tentang kebijakan penerimaan bintang, harus bersih, harus dilihat, apakah masih ada anggota kita yang main-main, seperti kasus terakhir yang terjadi di Madura, yang diungkap Propam.

Begitu juga di bagian lalu lintas dalam pembuatan SIM dan STNK kendaraan, biaya yang sudah ditetapkan harus sama dengan yang dikeluarkan para pemohon. "Kami pun juga telah di sebar untuk mengecek bahwa kebijakan dari Kapolda betul-betul sudah dilaksanakan dengan benar," katanya. [jete 2/jete3]



**KAPOLRES METRO DEPOK
BESERTA SELURUH JAJARAN DAN BHAYANGKARI**

MENGUCAPKAN
BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Selamat & Sukses

DIES NATALIS & WISUDA SARJANA ILMU KEPOLISIAN ANGGKATAN 48 & 49 TA. 2008

17 JUNI 2008

17 JUNI 2008

**KAPOLRES METRO DEPOK
KOMBES POL Drs IMAM PRAMUKARNO**